

PEMIKIRAN POLITIK MUHAMMAD RASYID RIDHA DAN MUHAMMAD IQBAL

Athma Mahmuda Damanik¹, Kaka Rafli Alamsyah², M Dzaky Aqila³, Velin Al Kudry Ahmad Nasution⁴

athmadamanik11@gmail.com¹, kakarafliamsyah@gmail.com², dzakyaqila398@gmail.com³, velinalkudryahmadnasution@gmail.com⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Dalam lapangan politik, Dunia Islam mulai bersentuhan dengan gagasan-gagasan pemikiran Barat. Sebelumnya, pada masa klasik dan pada masa abad pertengahan, umat Islam dapat dikatakan mendominasi percaturan politik internasional, para Tokoh muslim yang mempunyai peran sangat penting dalam perkembangan politik khususnya di zaman perkembangan politik islam modern yaitu Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Iqbal yang dimana mereka mempunyai berbagai macam pemikiran tentang Politik Islam di zaman Modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Iqbal dalam menghadapi gejolak politik islam yang telah mengaami kemunduran ketika umat islam memiliki kontak dengan para penjajah barat. Penelitian ini menggunakan metode penulisan Deskriptif Kualitatif berbasis Library Research (Studi Kepustakaan), Sumber pustaka primer yang digunakan adalah buku Pemikiran Politik Islam edisi ketiga.

Kata Kunci: Politik, Islam, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal.

ABSTRACT

In the political field, the Islamic world began to come into contact with Western ideas. Previously, in the classical and medieval era, Muslims could be said to dominate the international political scene, the season figures who had an important role in political development, especially in the modern Islamic political era, namely Muhammad Rasyid Ridha and Muhammad Iqbal, where they had various kinds of thoughts about Islamic politics. in Modern times. The aim of this research is to find out how Muhammad Rasyid Ridha and Muhammad Iqbal thought in facing the Islamic political turmoil which experienced a setback when Muslims had contact with western colonialists. This research uses a Qualitative Descriptive writing method based on Library Research (Library Study). The primary library source used is the third edition of the book Islamic Political Thought.

Keywords: Politics, Islam, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal.

PENDAHULUAN

Periode abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menunjukkan wajah pucat dunia Islam. Hampir seluruh wilayah umat Islam berada di tangan penjajah Barat. Dalam internal umat Islam sendiri, pemahaman keagamaan mereka yang tidak antisipatif terhadap berbagai permasalahan membuat mereka semakin jauh tertinggal menghadapi hegemoni Barat. Umat Islam lebih mengandalkan pemahaman para ulama masa lalu dibandingkan kemajuan-kemajuan baru untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Sejak tentara Mongol menyerang Bagdad pada tahun 1258 M, umat Islam paham bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Memang pemahaman ini awalnya dimaksudkan untuk menghindari disintegrasi yang lebih luas di kalangan umat Islam. Namun umat Islam harus membayar mahal, karena tertutupnya pintu ijtihad menempatkan mereka pada posisi yang kaku, tetap dan tidak terlalu dinamis dalam menghadapi dunia.

Kontak umat Islam dengan penjajah Barat ternyata membawa hikmah juga bagi umat Islam. Adanya kontak tersebut menyadarkan umat Islam bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat. Keadaan ini terbalik ketika umat Islam Abad Pertengahan menguasai ilmu dan peradaban dan Barat belajar banyak kepada Dunia Islam.

Di bidang politik, dunia Islam mulai bersentuhan dengan gagasan-gagasan Barat. Sebelumnya, pada masa zaman klasik dan zaman abad pertengahan, umat Islam bisa dikatakan mendominasi hampir seluruh kancah politik internasional. Semua dinasti Muslim telah mencapai puncak kekuasaan politik. Sejak dari dinasti bani Umayyah di Damaskus (661- 750 M), dinasti bani Abbas di Baghdad (750-1258 M), dinasti Umayyah II di Spanyol (756-1031 M), dinasti Safawi di Persia (1501-1736 M), dinasti Mughal di India (1526-1858 M), hingga terakhir dinasti Usmani di Turki (1300-1924 M), umat Islam memegang kendali dunia ketika itu. Belum lagi munculnya dinasti-dinasti kecil yang ikut mewarnai politik pemerintahan pada era klasik dan pertengahan.

Namun keadaan berbalik pada masa modern. Kekalahan-kekalahan dinasti Usmani dari Barat membuat rasa percaya diri negara Barat semakin tinggi untuk mengalahkan dunia Islam. Hal ini ditambah lagi dengan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi Barat, sehingga mereka mampu menjelajah berbagai belahan penjuru dunia yang pada gilirannya mereka dapat menguasai Dunia Islam. Pada Zaman modern, hampir seluruh Dunia Islam mengalami penjajahan Barat. Di samping menjajah, Barat ternyata juga mengembangkan gagasan pemikiran dan kebudayaan mereka ke tengah-tengah masyarakat Muslim.

Menghadapi penetrasi Barat ini, beberapa pemikir Muslim mengadopsi pandangan apriori dan anti-Barat; Ada juga orang yang menerima segala sesuatu yang datang dari Barat begitu saja, dan ada juga yang mencoba mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan pemikiran Barat, di samping membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam.

Kelompok pertama, yang disebut dengan kelompok integralis, menganggap bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik. Umat Islam harus meniru kebijakan-kebijakan politik yang dipimpin Nabi Muhammad SAW dan penerusnya, tanpa harus meniru Barat. Kelompok kedua, yang juga dikenal sebagai kaum sekularis, meyakini bahwa Islam dan politik adalah dua hal yang sangat berbeda. Islam tidak mendefinisikan aturan politik yang baku dan Nabi SAW diutus tanpa alasan untuk mendirikan negara.. Untuk maju secara politik, umat Islam harus meniru budaya maju, yaitu Barat. Oleh karena itu, umat Islam tidak perlu ragu untuk merangkul peradaban Barat, termasuk politik, dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan kelompok ketiga menolak pandangan kelompok pertama yang menganggap Islam mengatur segalanya secara lengkap, begitu pula kelompok kedua yang memisahkan agama dan politik. Agama Islam hanya memberikan beberapa nilai-nilai politik yang harus diterapkan oleh umatnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Karena itu, umat Islam dapat mengadopsi politik Barat, sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pemikiran

Secara etimologis berpikir berasal dari kata dasar berpikir yang berarti proses, cara atau tindakan berpikir, khususnya menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan bijaksana dan baik. Dalam konteks ini berpikir dapat dipahami sebagai usaha cerdas (ijtihad) yang timbul dari proses melatih pikiran dan hati untuk melihat fenomena dan berusaha mencari solusi dengan cara yang bijaksana, sedangkan pendidikan secara umum berarti sesuatu proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang (siswa) dalam upayanya tumbuh sebagai manusia (siswa) melalui pengajaran dan pelatihan upaya dan tindakan serta metode pendidikan suatu masalah berdasarkan konsep yang ada.

Berpikir adalah aktivitas manusia yang sangat mendasar untuk pelatihan dan pengembangan pribadi. Proses berpikir berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, karena dalam hal ini proses berpikir merupakan suatu kajian yang mempunyai rentang yang cukup luas dari jenis teori dan definisi yang berbeda, seperti yang dijelaskan Sagala (2011) yang didalamnya terdapat definisi berpikir. Proses sebagai aktivitas mental ini terjadi ketika seseorang dihadapkan pada suatu situasi yang memerlukan pemecahan masalah tersebut. Karena pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang seseorang menghadapi permasalahan yang kompleks sebagai bentuk belajar mandiri, menurut pandangan Santrock (1991), secara khusus menurutnya maka terjadilah proses berpikir sebagai jawaban dalam permasalahan. pemecahan masalah dan kemudian melibatkan pengambilan keputusan serta proses penalaran dan pembentukan konsep-konsep tertentu.

Hal berikutnya yang harus diperhatikan ketika berpikir adalah orientasi dengan maksud atau sifat peristiwa atau tindakan yang akan dilakukan. Berpikir berarti menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, bukan sekadar melihat ke masa depan. Selain itu, berpikir berarti merancang dan melakukan hal-hal baik untuk memahami apa yang dilakukan, serta melaksanakan suatu kegiatan dan membuahkan hasil. Ketika nilai-nilai baik merasuk jauh ke dalam kepribadian seseorang. Berpikir jauh ke depan akan membawa jiwa rohani menyadari arti hidup jauh. Karena kehidupan yang terjauh tidak sebanding dengan 4.444 masa kehidupan yang kita jalani, melainkan dengan kehidupan yang panjang dan kekal di akhirat. Berpikir berarti menggali lebih dalam untuk memahami bukan hanya simbol-simbol atau bentuk-bentuk saja, tetapi juga isi dan hakikatnya. Esensi ini digunakan sebagai cara bersikap, cara berbicara, cara bertindak, dan cara bertindak untuk mengangkat diri ke tingkat spiritualitas tertinggi. Berpikir merupakan aktivitas dasar manusia untuk mengekspresikan dan mengembangkan diri, berpikir merupakan penggerak untuk mencapai peradaban. Tujuannya untuk mengetahui kebenaran, mengamalkan syariat Islam dan mendekati diri kepada Allah hingga memiliki akhlak yang baik. Posisi ideologis dalam Al-Qur'an adalah menghormati dan menghindari hukuman Allah. Ide berpikir dengan nalar yang murni, kemudian berpikir dengan logika dan nalar yang sehat, berpikir secara komprehensif, mudah dipahami dan terbuka, dengan tersedia tips. Refleksi terkait dengan segala sesuatu mulai dari proses hingga hasil yang dicapai. Manfaat renungan yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah ilmu hikmah, ilmu hikmah dan tujuan positif, motivasi berbuat baik, peningkatan derajat di mata Allah dan memperoleh ilmu.

b. Politik

Sejarah asal usul kata politik berasal dari kata Yunani "polis" yang berarti kota yang berstatus negara. Istilah kebijakan mengacu pada berbagai kegiatan, tujuan sistem, dan implementasi tujuan tersebut. Secara umum, politik merupakan ilmu yang mempelajari hubungan kekuasaan, baik antar warga negara, antara warga negara dengan Negara, maupun hubungan antar Negara. Secara lebih luas, politik mengacu pada berbagai aktivitas dalam suatu sistem politik (negara) termasuk proses penentuan tujuan sistem tersebut dan pelaksanaan tujuan tersebut. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Pengambilan Keputusan: Berkaitan dengan tujuan sistem.
- b. Kebijakan umum (public policy): Berkaitan dengan distribusi dan atribusi nilai-nilai dalam masyarakat. tenaga kuda.

Implementasi kebijakan ini memerlukan kekuasaan dan wewenang untuk mendorong kerja sama dan menyelesaikan konflik yang timbul. Pada hakikatnya ilmu politik paling erat hubungannya dengan ilmu kenegaraan. Secara khusus, kami mendiskusikan dan menyelidiki isu-isu yang berkaitan dengan negara bersama-sama. Namun sifatnya berbeda: ilmu kenegaraan mempelajari dan mengajarkan teori-teori tentang asal usul, tujuan, dan tugas negara. Pada saat yang sama, ilmu politik mempelajari dan menggambarkan

kehidupan negara, sikap dan tindakannya dalam kehidupan keluarga dan dalam interaksi antar bangsa. Dengan kata lain, ilmu politik mampu membahas proses-proses yang terjadi dalam suatu negara, seperti kekuasaan dan struktur sosial. Mengenai ilmu politik, Dr. Hutaeruk, S.H., dalam bukunya “Sekilas Tentang Pelita Keempat Ilmu Politik”, berpendapat bahwa ilmu politik mempelajari dan mempelajari proses-proses pemerintahan dan masyarakat, yang kegiatan pokoknya adalah persaingan dan kerjasama dalam penggunaan kekuasaan dan budaya. ilmu politik dapat dikonstruksi:

- c. Mengidentifikasi asas-asas yang menjadi acuan dan wajib diperhatikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan b.
- d. Pelajari perilaku pemerintah sehingga Anda dapat menentukan apa yang berhasil dan apa yang tidak, serta merekomendasikan perbaikan dengan pasti dan jelas. tenaga kuda.
- e. Mempelajari perilaku politik warga negara, baik individu maupun kelompok
- f. Mengamati dan meneliti rencana kerja sama sosial, kemakmuran, dan kerja sama internasional.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan historis. Karena penelitian ini membahas pemikiran Natsir, maka wajar saja jika peneliti mengutip artikel, jurnal, dan pidatonya sebagai data primer. Kemudian sebagai data sekunder, peneliti menelusuri artikel-artikel orang baik dalam buku/jurnal ilmiah terbitan lima tahun terakhir yang menyebutkan ideologi politik Natsir. Teknik pengumpulan dan analisis data, peneliti berusaha melakukan pencarian pada website Connection Article Search, sebuah alat visual yang dapat membantu peneliti menemukan dan mengeksplorasi artikel ilmiah dalam pencarian bahan penelitiannya (Amanpreet Kaur, 2022). Berkat website ini, peneliti mengidentifikasi artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Muhammad Rasyid Ridha

Nama lengkap seorang Rasyid Ridha ialah Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Muhammad Syams al-Din al-Qalmuny. Ia dilahirkan di Desa Qalamun, tidak jauh dari Tripoli, daerah Syria (Syam) pada tanggal 2 H (1865 M). Menurut suatu keterangan, silsilah keturunan atau nasab dari Muhammad Rasyid Ridha masih bersambung kepada cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husein ibn Ali ibn Abi Thalib. Oleh karena itulah, seorang Muhammad Rasyid Ridha memakai gelar al-Sayyid di depan namanya.

Sejak kecil ia telah menunjukkan sifat kedewasaan diri yang luar biasa. Setelah meningkat dewasa ia dikenal di seluruh wilayah Tripoli sebagai salah seorang ulama yang cerdas. Karena kepandaiannya, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang politik dan kenegaraan dan reputasinya telah menyebar luas, ia menjadi salah seorang tokoh aliran modern dalam Islam

Ayahnya, Ali Ridha, adalah salah seorang ulama dan ahli Tarekat Syadziliyah. Keberadaan orangtuanya yang demikian ternyata dapat memengaruhi perkembangan dan sikap keberagamaannya sejak kecil. Seperti dalam hal berpakaian, ia selalu memakai jubah dan serban serta tekun dalam pengajian, wirid, sebagaimana pengikut Tarekat Syadziliyah lainnya. Muhammad Rasyid Ridha ingin mewariskan kepada keturunannya kemampuan dan akal untuk mengubah nasib mereka yang terkena segala macam khurafat dan ajaran sesat serta ajaran yang menyimpang dari kebenaran ajaran agama Islam.

Dengan demikian, ia dapat digolongkan sebagai pemikir radikal yang berupaya memurnikan ajaran Islam yang dianggapnya menyimpang dari Al-Quran dan Hadits. Selain

itu, ia adalah seorang pembela Islam (mujaddid) yang bersemangat dan seorang politisi gerakan reformasi agama dan negara di Mesir dan Tripoli.

Sebagai seorang mujaddid muslim tentunya sebelumnya telah mendapatkan berbagai macam pembinaan, baik keagamaan maupun umum. Pendidikan yang diterimanya, semasa kecil ia bersekolah di madrasah adat di al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Qur'an. Pada tahun 1882 M, ia melanjutkan studinya di Madrasah al-Wathaniyah al-Islamiyah (Sekolah Islam Nasional di Tripoli). Di Madrasah ini, selain dari bahasa Arab diajarkasional bahasa Turki dan Perancis, dan diajarkan juga pengetahuan-pengetahuan modern.

Pada tahap berikutnya, madrasah yang dimasukinya itu mendapat tantangan dari pemerintah setempat, karena orang-orang di luar Islam menganggap bahwa sistem pengajaran, Materi dan kurikulum madrasah memuat pembaruan yang tidak mendukung kebijakan pemerintah saat itu. Akhirnya madrasah tersebut dibubarkan. Rasyid Ridha pindah dan melanjutkan studinya di salah satu pesantren di Tripoli, namun hubungannya dengan para pendiri Madrasah al-Wathaniyah seperti Syekh Husain al-Jisr tetap berlanjut sebagai pembimbing dan pembina utama Rasyid Ridha di masa mudanya.

Di bawah kepemimpinan al-Jisr karya Syekh Husein, Rasyid Ridha juga selalu berusaha membaca tulisan-tulisan ilmu pengetahuan modern karya para penulis Kairo, dengan demikian, ia dapat mengenal lebih jauh tentang kemajuan Eropa dan negara-negara lainnya. Kemudian Rasyid Ridha juga memperoleh tambahan ilmu dan jiwa keagamaan melalui membaca kitab-kitab yang dikarang oleh al-Ghazali, seperti Ihya' 'Ulûmiddin yang sangat besar pengaruhnya terhadap hidup dan kehidupannya, terutama sikap patuh dan kebaktiannya terhadap agama.

Pada dasarnya, pokok-pokok pikiran dan usaha-usaha yang dilakukannya Ridha dalam perjuangan umat Islam tidak jauh berbeda dengan pokok-pokok pikiran para tokoh pembaru lainnya, seperti Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, yaitu bersandar pada segi keagamaan, yaitu tuntutan adanya kemurnian ajaran Islam, baik dari segi akidahnya atau dari segi amaliahnya.

Timbulnya ide-ide pembaruan tersebut bermula pada pengalaman yang diperolehnya sewaktu dalam pendidikan, melalui membaca kitab-kitab dan buku-buku serta majalah yang membicarakan tentang keberadaan ajaran agama Islam bagi penganutnya. Salah satu bahan bacaan yang sangat memengaruhinya adalah majalah al-'Urwah al-Wutsqâ yang terbit di Paris di bawah asuhan Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh (1884-1885).

Ketika Muhammad Abduh dibuang ke Beirut, Rasyid Ridha berkesempatan untuk berjumpa dan berdialog dengannya. Perjumpaan dan dialognya dengan Abduh makin memperkuat kesan dan semangatnya untuk mengikuti arus pemikiran pembaruan tokoh asal Mesir ini, terutama tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pembaruan pemikiran Islam. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari gurunya, Rasyid Ridha mencoba menerapkan ide-ide pembaruannya di negara asalnya, namun upaya serta usahanya mendapat tantangan dari pemerintah setempat. Lalu ia pindah ke negara asal gurunya, yakni Mesir, dan di sana ia berhasil menerbitkan majalah al-Manûr dalam rangka menyebarluaskan ide-ide pembaruannya.

Sebagai tindak lanjut dari perjuangannya yang terhambat karena di negeri asalnya tidak bisa mengembangkan ide-ide, akhirnya Ridha menjadikan Mesir sebagai Tanah Air kedua dan pusat kegiatan intelektualnya pada akhir abad ke-19, sehingga ia dapat mengambil sudut pandang yang lebih luas. Dalam sejarah pendidikan dan perjuangannya, Rasyid Ridha dapat dikatakan sebagai seorang ulama gigih yang selalu berjuang dalam hidupnya demi kemajuan Islam, namun perjuangannya terhenti setelahnya ia menutup Sejarah lembaran hidupnya pada tanggal 23 Jumadil Ula 1354 H/22 Agustus 1935 M.

Namun usaha-usahanya tetap tiada akhir, terutama dalam mewujudkan kemurnian ajaran Islam.

Terjadi pergulatan dan persaingan antar partai politik di tanah air akibat adanya campur tangan negara lain seperti Inggris dan Perancis yang ingin menguasai negara melalui tipu muslihat dan taktik para tokoh politisi Islam dan organisasi partai mengadakan persaingan dan perebutan pengaruh yang saling menjatuhkan satu sama lain. Dengan demikian, rasa nasionalisme yang didasari keyakinan menyimpang dari tujuan kebangsaan yang luhur dan mengarah kepada terciptanya kepentingan-kepentingan yang tak berharga. Deklarasi ini memunculkan gerakan nasionalis dengan tanda-tanda kapasitas dan potensinya, termasuk isu jihad yang merupakan senjata efektif untuk melawan kekuatan negara lain yang sedang dibalikkan saat ini. Yang ada adalah senjata pemilikinya karena adanya perselisihan yang timbul antar umat Islam, terutama dalam masalah keyakinan agama. Serikat pekerja menjadi berantakan dan pembangunan masyarakat semakin stagnan. Dampak dari pertarungan dan persaingan tajam antara umat Islam dalam masalah keagamaan pada akhirnya dapat memiliki dampak yang bisa melemahkan kekuatan bangsa.

Kondisi kehidupan seperti ini pada akhirnya merambat hampir ke seluruh wilayah yang diwarnai dengan pertengkar dan perpecahan umat Islam. Kekuatan umat pudar, fitnah sempat menghias kehidupan, dan degradasi nilai akhlak semakin tampak. Timbulnya berbagai masalah tersebut merupakan hasil karya tokoh-tokoh serta bangsa-bangsa lain yang ingin menghancurkan umat Islam serta kebenaran ajaran agamanya.

Sejak jatuhnya Baghdad pada pertengahan abad ke-13 M (1258) yang menandai tamatnya dinasti Abbasiyah di tangan orang-orang Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, Dunia Islam tidak lagi mempunyai khilafah yang diakui oleh umat Islam sebagai lambang persatuan. Yang ada hanya kerajaan-kerajaan kecil di daerah dengan gelar "sultan" bagi para penguasanya. Keadaan ini berlangsung lama sampai munculnya Kerajaan Usmani (Ottoman Empire) yang mengangkat khalifah yang baru di Istanbul, Turki pada abad ke-14, dan kemunculan ini dipandang sebagai khilafah dan pemerintahan sedunia.

Kerajaan Turki Usmani pada periode awal merupakan kerajaan yang sangat kuat, sehingga dapat dengan mudah melakukan ekspansi dengan luas dan cepat. Akan tetapi, setelah Sultan Sulaiman al-Qanuni meninggal dunia, 1566, terjadilah perebutan kekuasaan antara putra-putranya yang menyebabkan awal dari suatu kehancuran, walaupun kerajaan ini dalam kurun waktu beberapa abad masih tetap bertahan dan dipandang sebagai negara yang kuat, terutama dalam bidang militer.

Ketika Perang Dunia I meletus, Turki bergabung dengan Jerman yang kemudian mengalami kekalahan. Akibatnya kekuatan Kerajaan Turki Usmani semakin ambruk, hingga akhirnya Kerajaan Turki Usmani diserbu oleh tentara Sekutu. Sejak itulah kebesaran Turki benar-benar tenggelam dan seakan-akan tidak ada lagi Kerajaan Islam yang betul-betul merdeka. Lebih jauh lagi, kaum reformis Muslim pada masa itu melihat bahwa kelemahan Türkiye terletak pada kepribadian raja yang absolut, tidak mampu beradaptasi dengan gagasan yang berkembang dari para pemimpin negaranya.

Situasi dan kondisi yang menyebabkan dihapuskannya kekhilafahan bersumber dari kekalahan Turki Usmani dalam Perang Dunia I dan karena jatuhnya martabat sultan/khalifah karena hubungannya dengan penyerbu-penyerbu asing ke Turki, yang ingin membagi-bagi dunia Arab ke dalam wilayah kekuasaannya. Keadaan ini mendorong seorang Rasyid Ridha untuk menentang semua praktik-praktik penyimpangan dan tekanan politik. Menurut Rasyid Ridha, umat Islam harus bersatu dan persatuan tersebut harus didasarkan kepada sistem ideologi Islam, bukan ideologi nasionalisme yang tidak sesuai dengan konsep persaudaraan universal antar-sesama umat Islam.

Agaknya pemahaman politik Islamnya diwarnai oleh konsep Pan-Islamisme dari

Jamaluddin al-Afghani. Adapun sistem kenegaraan yang dipandangya sesuai dengan Islam adalah negara dalam bentuk kekhalifahan, suatu pandangan tradisional tentang sistem politik Islam Pandangan Tentang Khilafah.

Pandangan Tentang Khilafah

Menurut Rasyid Ridha, sistem politik Islam bersifat tauhid, pakta dan khilafah. Prinsip tauhid akan menolak konsep kedaulatan manusia yang sah, baik yang bersifat personal maupun yang lainnya. Menurut Ridha, satu- satunya yang berdaulat hanyalah Allah semata-mata. Risalah merupa- kan perantara manusia dengan Tuhannya melalui Rasul dan Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum yang abadi. Oleh karena itu, perjanjian tersebut harus menjadi dasar kebijakan Islam.

Kata “kekuasaan” atau “kekhalifahan” secara otomatis membangkitkan otoritas ilahi, kekuasaan raja, atau kekuasaan paus. Menurut Al- Qur'an, kelompok orang mana pun, ia merupakan hak kolektif dari semua yang mengakui kedaulatan mutlak Tuhan dari atas diri mereka sendiri dan menganut ketentuan hukum Ilahi, yang disampaikan melalui Rasul sebagai sang pembuat hukum yang mengatasi semua hukum dan peraturan.

Rasyid Ridha dalam sebuah bukunya menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan umat, yaitu khilafah, imamah, dan imârah al-mu'minin. Ketiga kata ini mempunyai arti yang sama, yaitu pimpinan pemerintahan umat Islam seluruh masyarakat untuk menjaga kesejahteraan agama dan urusan dunia.

Untuk mendukung pendapatnya, Rasyid Ridha menggarisbawahi pendapat al-Taftazani yang mengatakan bahwa imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yang diwarisi dari Nabi. Rashid Ridha juga sependapat dengan al-Mawardi yang mengatakan bahwa Imamah didirikan untuk menggantikan Nabi SAW dalam menjaga urusan agama dan sekuler. Lebih lanjut, Ridha juga mengedepankan pendapat dan argumen- tasi dari al-As'ad tentang khilafah sebagai kewajiban syariah, yaitu ijma sahabat dalam pengukuhan Abu Bakar sebagai khalifah (pengganti) Nabi Muhammad SAW sampai mereka mendahulukannya dari penguburan Nabi SAW. Karena dengan adanya imam, pelaksanaan hukum syariat ter- jamin dan umat terhindar dari berbagai mudarat. Adanya kewajiban taat pada Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah memang menghendaki diangkatnya seorang imam

Dari pendapat yang dikemukakan Ridha tadi dapat diambil pengertian khilafah, yakni kepemimpinan menyeluruh dalam persoalan yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW

Dalam agama Islam, kekuasaan berada di tangan umat, sedangkan kepala negara adalah imam untuk umatnya (khalifah yang melaksanakan undang-undang). Kekuasaan (kedaulatan) ada di tangan umat Islam dan diselenggarakan oleh ahl al-hall wa al-'aqd, yang mempunyai wewenang untuk mengangkat para khalifah dan para imam, juga berwenang untuk memecatnya jika persyaratannya sudah terpenuhi demi kepentingan umat.

Ahl al-hall wa al-'aqd diartikan sebagai orang yang mempunyai kekuatan untuk melepaskan dan mengikat. Istilah ini diciptakan oleh para ulama fiqh untuk menyebut mereka yang berperan sebagai wakil rakyat untuk mengutarakan hati nuraninnya. Menurut Rasyid Ridha, selain berhak memilih dan mengangkat khalifah, Ahl al-Halli wa al-'Aqd juga berhak memberhentikan khalifah jika ada permasalahan yang memerlukan pemberhentian dan tanggung jawabnya. Ahl al-Halli wa al-'Aqd bukan hanya sampai di situ saja, dia harus mengawasi tindak tanduk khalifah dalam menjalankan tugasnya.

Keberadaan khilafah bagi Ridha adalah wajib syar'i dan sistem khilafah baginya mempunyai sifat internasional (kekuasaan politik yang mendunia). Artinya, di Dunia Islam hanya boleh ada satu khilafah dan seorang khalifah. Tidak dibenarkan ada dua khalifah yang berkuasa. Ia beralasan kepada Sabda Nabi SAW., "Apabila satu negara mempunyai dua

khalifah, maka bunuhlah salah satu dari keduanya." (HR. Muslim)

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa jika khalifah lebih dari satu, maka bertentangan dengan tujuan didirikannya khilafah yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia dalam satu badan politik. Dengan satu konsep satu khilafah dan kesatuan umat, Ridha menolak negara kesatuan berdasarkan kebangsaan (nasionalisme) menurut konsep Barat dengan mengesampingkan fanatisme, sebab dalam Islam rasa kebangsaan bisa tumbuh di atas dasar keagamaan.

Rasyid Ridha telah berusaha keras dalam merumuskan ide-idenya bahwa Islam merupakan suatu konsep yang utuh dan lengkap dalam segala sesuatunya. Dalam akhir pembahasannya, Ridha menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa teori klasik tentang kekhalifahan telah menetapkan tolok ukur bagi penyelenggaraan kekhalifahan secara benar.

Rasyid Ridha yang pada awalnya memang bukan pemikir politik, pemikiran politiknya berawal dari reaksi terhadap persoalan-persoalan umat Islam yang mengalami kemunduran total dalam segala aspek kehidupan pada waktu itu Masyarakat pada masa itu sedang menghadapi dua permasalahan besar dan inilah yang menjadi faktor yang mempengaruhi pemikiran Rasyid Ridha, yaitu

1. Faktor internal, yang berkaitan dengan kemunduran umat Islam dalam segala aspek kehidupan dan para penguasa yang zalim;
2. Faktor eksternal, yaitu bangsa-bangsa Barat yang telah mengalami kemajuan di bidang ilmu dan teknologi, sehingga umat Islam terdesak dan menjadi bangsa yang terjajah oleh bangsa Barat.

Di antara faktor intern yang terjadi pada masanya adalah bahwa umat Islam telah dilanda segala macam khurafat dan bid'ah serta menyeleweng dari kebenaran ajaran agama Islam. Rasyid Ridha sendiri telah menjelaskan dalam bukunya *Târîkh Ustadz al-Imâm* bahwa motifnya menerbitkan majalah *al-Manâr* adalah "Berpangkal pada kesadaran atas kelemahan umat Islam dan mencoba mengatasinya dengan jalan memperbaiki pendidikan dan pengajaran dan mengembangkan pikiran-pikiran yang benar dan terstruktur dalam rangka membasmi kebodohan dan pikiran yang merusak."

Dari pernyataan di atas, jelaslah bahwa akibat penyelewengan ajaran agama Islam tersebut dapat merusak ideologi umat Islam dan juga perpecahan serta umat menjadi kacau balau. Dalam hal ini, Rasyid Ridha menganalisis bahwa ajaran yang murni akan membawa kemajuan bagi umat Islam. Oleh karena itu, segala jenis khurafat, ajaran sesat dan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam harus dihilangkan.

Penyebab kemunduran Islam juga disebabkan oleh fatalisme dan ajaran tarekat atau tasawuf yang menyesatkan. Semua itu membawa kemunduran atau keterbelakangan umat Islam, sehingga menjadi tidak dinamis. Dengan demikian, sikap aktif dan dinamis perlu dihidupkan dan dilembagakan

Selanjutnya, mengenai masalah mazhab yang terkadang dapat membawa umat kepada perpecahan akibat ajarannya, Ridha mengharapkan adanya persamaan dalam masalah fundamental atau pokok. Artinya, dalam masalah yang pokok hendaknya umat Islam satu irama, sedangkan untuk masalah furû'iyah diberikan kebebasan bagi masing-masing untuk menggunakan akal pikirannya

Faktor kedua yang memengaruhi pemikirannya adalah akibat kemajuan pihak asing dalam segala hal yang membuat umat Islam terdesak dan menjadi bangsa yang bergantung pada bangsa-bangsa Barat. Kerajaan Usmani merupakan kerajaan yang cukup luas, meliputi sebagian Eropa, Timur Tengah dan sebagian Afrika, namun para penguasa tidak memerhatikan masa depan rakyatnya yang masih berpikiran tradisional. Akhirnya, lama kelamaan Kerajaan Usmani mengalami kemunduran, khususnya dalam bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi dan lebih terasa lagi setelah kalah perang pada abad ke-17.

Masa kemunduran yang berabad-abad lamanya mengakibatkan terjadinya pergeseran panggung sejarah peradaban Islam. Turki bersedia meniru teknologi militer Barat untuk menciptakan senjata baru namun belum menunjukkan kemampuan memahami konsep politik Islam. Dengan rasa percaya diri yang penuh, rakyat Turki tidak mempunyai perasaan bahwa Eropa telah memasuki wilayah kekuasaan Kesultanan Turki dan mencekiknya.

Masuknya kekuasaan Perancis ke dalam pusat Islam untuk menetapkan sikapnya terhadap Barat yang jaya, mengadakan hubungan kebudayaan antara Timur yang tidur nyenyak dengan Barat yang datang bukan sebagai teman berunding tetapi sebagai penguasa dan penjajah, menimbulkan rasa harga diri yang diremehkan dan hal ini menjelma menjadi usaha untuk kebangkitan keagamaan, kebudayaan, dan politik. Dengan melakukan berbagai usaha-usaha antikolonial, bangsa Arab muncul dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, Rasyid Ridha menyatakan bahwa umat Islam jangan meniru pola Barat, bahkan ia mengharamkan untuk mengikutinya, sebab di dalam Islam semuanya sudah lengkap

Rasyid Ridha yang berasal dari Syria yang selalu dinamis dan bekerja keras, mengadakan suatu gerakan reformasi Arab Ia menyerap gagasan Muhammad Abduh dengan menjelaskan agama dari sumbernya, khususnya Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Bagi Rasyid Ridha, kesatuan ideologi dan politik tidak akan ada gunanya menghadapi keserakahan Barat. Dalam perspektif ini, Rasyid Ridha berpendirian untuk mendirikan khilafah yang baru yang dapat memainkan peranan yang aktif dalam urusan spiritual dan materiil masyarakat Islam.

Walaupun ia seorang yang berpegang keras pada hukum, ia tidak membatasi diri untuk kembali kepada peraturan-peraturan tradisional. Rasyid Ridha, seperti halnya gurunya Muhammad Abduh, melihat manfaat gagasan Abduh ketika terjun dalam aktivitas politik. Untuk melaksanakan rencana pemulihan kekhalifahan, Ridha mengusulkan diadakannya konferensi Islam di Kairo, Mesir, dengan partisipasi perwakilan seluruh negara Islam dan umat Islam, ditambahnya Mesir adalah satu-satunya negara yang layak menjadi penyelenggara pertemuan akbar Islam seperti itu. Namun ia tidak memberikan uraian lebih lanjut tentang alasannya.

Muktamar tersebut berlangsung pada tahun 1926, tetapi berakhir dengan kegagalan. Karena banyaknya dan kuatnya pertentangan di antara para peserta muktamar, akhirnya tidak dapat tercapai kesepakatan. Peserta terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pertama, yang ingin mempertahankan kepemimpinan Sultan Abdul Majid (Turki) yang sudah dilucuti oleh Mustafa Kemal dari segala kekuasaan dan menghendaki jabatan khalifah dikembalikan kepadanya; kelompok kedua, yang mendesak agar mengakui kekhalifahan Syarif Husein, yang pada tahun 1916 memberontak terhadap kekuasaan Turki dan menyatakan dirinya sebagai khalifah; sedangkan kelompok ketiga yang terdiri dari para ulama-ulama Mesir, mereka berusaha keras agar muktamar memutuskan Raja Fuad dari Mesir sebagai khalifah.

Akhirnya muktamar tersebut gagal dan sistem politik Eropa yang diadopsi oleh Mustafa Kemal yang tak dapat dibantah lagi banyak menimbulkan kejengkelan bagi pemikir Arab. Rasyid Ridha dalam majalah al-Manâr mengklaim bahwa Turki dan daerah-daerah yang ditaklukkannya menjadi beban bagi Islam dan kaum Muslim lain

Khilafah Usmani pernah berjaya di arena internasional selama kurang lebih enam abad dan pernah disegani di Eropa. Setelah melalui proses panjang, Kemal Ataturk memberi pukulan mematikan terhadap khilafah ini dengan mendirikan Republik Turki pada tahun 1923 dan menghapus jabatan khalifah pada tanggal 3 Maret 1924. Dan sejak saat itu, gelar khalifah sebagai pemimpin dalam arti politis hilang dari percaturan internasional.

Rasyid Ridha mendiagnosis bahwa kerusakan ulama dan ketundukan mereka kepada

penguasa sebagai salah satu sebab utama penyimpangan kekhalifahan dari bentuk idealnya di bawah al-Khulafa' al-Rasyidûn menjadi hanya sebagai alat untuk melayani kepentingan rendah para penguasa dan dengan demikian menjadi tirani sebagai bentuk wajar pemerintahan dalam Islam. Pandangan politik Rasyid Ridha sangat tradisional, selain karena pandangan pribadinya, hal ini mungkin juga disebabkan oleh pengetahuannya yang sangat terbatas tentang pemikiran Barat, antara lain karena ia tidak menguasai bahasa-bahasa Eropa, sedangkan karya-karya tulis para pemikir Barat disalin ke dalam bahasa Arab masih relatif jarang.

Sebagaimana pembaru lain, ia pun berpandangan bahwa kemunduran umat Islam selain disebabkan oleh kelemahan dan perpecahan politik, juga disebabkan oleh pemahaman dan orientasi teologisnya yang bersifat fatalistik. Karena itu, selain harus menyusun kembali kekuatan dan persatuan politik, umat pun harus mengubah pandangan teologisnya serta berorientasi kepada kemajuan sains dan teknologi sebagaimana berkembang di Barat.

Namun demikian, Rasyid Ridha telah mulai merintis pemikiran-pemikiran baru tentang khilafah, yang ternyata banyak memengaruhi pemikir-pemikir Islam selanjutnya.

b. Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, Pakistan pada 9 November 1877. Nenek moyangnya berasal dari keluarga Muslim taat yang telah memeluk agama Islam tiga abad sebelum kelahirannya. Kakek dan ayahnya adalah orang-orang yang selalu hidup dalam tradisi sufistik.

Pendidikan awalnya ditangani oleh ayahnya sendiri. Kemudian ia dimasukkan ke maktab (madrasah) untuk belajar Al-Qur'an. Selanjutnya, Iqbal masuk Scottish Mission School di Sialkot. Di sini ia bertemu dan belajar dengan Mir Hasan, seorang ulama sufi yang kelak memberi pengaruh dalam perkembangan pemikiran dan kepribadiannya. Setelah tamat dari Scottish, 1895, Iqbal melanjutkan pendidikan ke Government College di Lahore dan berguru pada Sir Thomas Arnold. Lewat Arnoldlah untuk pertama kalinya Iqbal berkenalan dengan pemikiran Barat, sebelum nantinya berinteraksi langsung ketika belajar ke sana. Iqbal menyelesaikan B.A.-nya dalam bidang bahasa Arab pada 1897 dan M.A. di bidang filsafat tahun 1899.

Pada tahun 1905, atas saran Thomas Arnold, Iqbal meneruskan studi di Trinity College, Cambridge, Inggris dan belajar pada filsuf McTaggart dan James Ward. Di samping itu, ia juga mengikuti kursus tentang hukum. Dari Inggris, Iqbal melanjutkan studi ke Jerman untuk mengambil gelar Doktor (Ph.D.) Pada 4 November 1907, Iqbal berhasil mempertahankan disertasi doktornya berjudul *The Development of Metaphysics in Persia*.

Menurut Wilfred Cantwell Smith, ada tiga hal yang turut memengaruhi perkembangan pemikiran keislaman Iqbal ketika berada di Eropa. Hal ini kelak semakin mengkristal dalam aktivitas dan gerakannya, setelah ia kembali ke negerinya, India, untuk menyadarkan umat Islam disana yang sedang terlena. Pertama, vitalitas dan aktivitas kehidupan orang Eropa yang luar biasa; kedua, berhubungan dengan yang pertama, orang renangkap visi yang sangat mungkin dikembangkan dalam hidupan bangsa-bangsa Timur berupa potensi diri yang telah begitu luas dikembangkan oleh orang Barat; dan ketiga, ada bagian tertentu kehidupan Barat yang melahirkan manusia-manusia yang terpecah ke pribadiannya (split personality). Peradaban Barat yang ditandai semangat kapitalisme dan liberalisme, dalam pandangan Iqbal, memberi andil yang besar bagi tumbuhnya keputusasaan individu. Hal ini menjadi sasaran kritik Iqbal.

Dari kutipan ini jelaslah bahwa Iqbal sangat kritis menghadapi dan menanggapi nilai-nilai Barat. Iqbal dapat menerima vitalitas dan dinamika masyarakatnya yang begitu tinggi dalam menjalankan kehidupan, karena hal ini tidak bertentangan dengan Islam.

Sebaliknya, hal-hal yang berlawanan dengan semangat ajaran Islam dikecam Iqbal. Peradaban Barat memang maju, tetapi kering dari nilai-nilai spiritual keagamaan. Dalam syairnya, Iqbal mengungkapkan bahwa peradaban Barat sebenarnya merupakan lembah kegelapan yang kekurangan mata air kehidupan. Iqbal mengumpamakannya seperti buah yang ranum yang kelak akan jatuh meluncur.

Dalam pergulatannya dengan nilai-nilai Barat, Iqbal melihat ada yang hilang dari peradaban Barat, yaitu semangat spiritual dan transenden. Barat terlalu menumpukan segala permasalahan pada akal rasi dan menafikan keberadaan hal-hal yang bersifat immateri. Iqbal pulang ke India pada 1908. Pengetahuan hukum yang pernah diperolehnya di Eropa dimanfaatkan Iqbal dengan menjalankan profes sebagai advokat. Selain itu, Muhammad Iqbal juga mengajar di Government College lembaga pendidikan yang pernah menjadi almamater Muhammad Iqbal. Di lembaga ini ia mengajar tentang filsafat, sastra Arab, dan Inggris. Namun Iqbal hanya setahun mengajar di sini. Ia mengundurkan diri karena merasa tidak bebas mengemukakan pemikiran dan kegelisahan intelektualnya selama bekerja pada Pemerintah Inggris di Government College,

Di samping menjadi advokat, Iqbal sering diundang oleh berbagai lembaga pendidikan untuk memberikan ceramah. Pada tahun 1928, Muhammad Iqbal diundang untuk memberikan serangkaian ceramah di Madras, Allahabad dan juga Aligarh. Ceramah-ceramah tersebut kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku berjudul Rekonstruksi Pemikiran Keagamaan dalam Islam. Iqbal juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik negaranya. Ia berpartisipasi dalam upaya memperoleh kemerdekaan bagi umat Islam untuk menyesuaikan kehidupan mereka di luar pemerintahan Hindu di India. Iqbal berkomentar, selama ini belum ada hubungan harmonis antara umat Islam dan Hindu di India. Umat Islam selalu menjadi korban agitasi politik Hindu. Sehingga, saat diminta oleh teman-temannya menjadi anggota DPR Punjab, Iqbal tak segan-segan menerimanya.

Sebagai presiden konferensi tahunan Liga Muslim di Allahabad, Iqbal memberikan pidato pertamanya dan menyerukan pembagian India menjadi dua negara bagian. Baginya, umat Islam hanya bisa hidup dan bertahan hidup di India jika pemerintahannya independen dari dominasi Hindu. Dalam suratnya kepada Muhammad Ali Jinnah, Iqbal mengatakan bahwa cara terbaik untuk membawa perdamaian ke India adalah dengan memecah belah negara berdasarkan prinsip ras, agama, dan bahasa.

Pada tahun 1931 dan 1932, Iqbal mewakili Liga Muslim di Meja Bundar London.. Dalam perjalanan pulang, Iqbal sempat singgah di Cordova, Spanyol, untuk menyaksikan sisa-sisa peninggalan kejayaan Islam di sana. Sejak tahun 1935, kondisi kesehatan Iqbal menurun drastis kencing manis yang dideritanya semakin Akhirnya, pada 21 April 1938 Iqbal mengembuskan napas terakhir Meskipun tidak sempat menyaksikan wujud impiannya berdirinya satu Sebagai bangsa tersendiri di anak benua India, cita-cita tersebut dilanjutkan oleh sahabatnya Muhammad Ali Jinnah. Pada tanggal 15 Agustus 1947, umat Islam berhasil mencapai negara merdeka, bebas dari hegemoni Hindu, dengan nama Pakistan..

Pemikiran Politik Iqbal

Sebagai Muslim yang hidup dalam tradisi sufistik, Iqbal meyakini sepenuhnya bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan berfungsi sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia demi kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat kelak. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama hukum Islam. Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa Al-Qur'an adalah kitab undang-undang yang memuat berbagai peraturan secara detail. Menurut Muhammad Iqbal, tujuan dari Al-Qur'an adalah untuk membangkitkan kesadaran manusia yang lebih tinggi tentang hubungan hamba dengan Tuhan dan alam semesta. Al-Qur'an tidak memuat semua permasalahan secara tuntas dan detail. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk mampu menerjemahkan dan

menjabarkan semangat nash Al-Qur'an yang masih bersifat garis besar ke dalam realitas kehidupan. Manusia harus menggunakan akal dan pemikirannya untuk melabuhkan Al-Quran sesuai dengan semangat dan dinamika masyarakat. Al-Quran tetap relevan dengan gerakan sosial.

Gagasan Iqbal yang benar-benar mengapresiasi pergerakan dan dinamisme masyarakat dapat dipahami jika mengetahui konteks kondisi sosial politik komunitas Muslim India yang dihadapinya saat itu dan komunitas Muslim di berbagai wilayah pada umumnya. Iqbal melihat, umat Islam tidak mampu memahami secara utuh dan integral maksud- maksud yang dikandung Al-Qur'an. Sepanjang sejarah kemunduran hukum Islam, umat Islam telah menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab yang berisi peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, pandangan ini cenderung memisahkan secara mekanis antara ayat hukum dan ayat non hukum. Pandangan ini pada akhirnya mengarah pada penafsiran Al-Quran yang literal dan (sebagian) bersifat atomistik. Bahkan ada sebagian ulama yang memahaminya secara literal dan tekstual, tanpa melihat roh atau maqâshid al-syari'ah dari ayat-ayat tersebut. Akibatnya, umat Islam tidak mampu menjabarkan dengan baik pesan-pesan yang dikandung Al-Qur'an.

Keadaan inilah yang disaksikan Iqbal di India. Umat Islam yang ditemuinya terobsesi dengan pemahaman para ulama zaman dahulu. Mereka tidak berani mempertimbangkan kembali (apalagi mempertanyakan) kewibawaan pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Tentu saja pemahaman keislaman mereka yang berbau Abad Klasik dan Pertengahan dan tidak mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat yang dihadapi tidak mampu membawa umat Islam pada kemajuan. Mereka bagaikan hidup di dalam dua masa. Secara fisik mereka hidup pada abad modern, namun pemikiran mereka masih berada pada masa lalu. Padahal, menurut Iqbal, tidak satu pun ulama-ulama pendiri mazhab yang menuntut finalitas terhadap pemikiran hukum Islam mereka.

Di samping itu, Al-Qur'an memandang bahwa kehidupan adalah satu proses cipta yang kreatif dan progresif. Oleh karenanya, umat Islam harus berani mencari rumusan baru secara inovatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Namun Iqbal melihat bahwa umat Islam telah menganggap sakral pendapat ulama-ulama masa lalu. Akibatnya, menurut Iqbal, ketika masyarakat bergerak maju, hukum Islam tetap berjalan di tempatnya. Dalam sebuah suratnya kepada Jawaharlal Nehru, pemimpin nasionalis India, seperti dikutip Feroze Hassan, Iqbal dengan tegas menyatakan bahwa ulama (mullah) konservatif adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menutup kemurnian semangat doktrin Al-Qur'an yang progresif itu sejalan kejatuhan Baghdad oleh tentara Mongol, 1258 M.

Menurut Iqbal, para mullah dan sufi telah menyeret umat Islam jauh dari maksud Al-Qur'an yang sebenarnya. Pendekatan mereka terhadap kehidupan menjadi fatalistis dan negatif. Umat Islam India, menurut Iqbal, lebih suka mengimpor ide-ide ajaran Hindu dan Yunani yang me mang mengajarkan fatalisme daripada mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an secara baik dan benar.

Berangkat dari pemikirannya tentang semangat Al-Quran yang sangat mengapresiasi gerak dan dinamisme, Iqbal terobsesi untuk menyadarkan umat Islam untuk mengubah kondisi mereka yang statis dan stagnan menjadi aktif dan progresif dalam menjalankan kehidupan dunia. Karena itu, menurut Iqbal, Al-Qur'an memandang perlu menyatukan agama dan negara, etika dan politik dalam satu wahyu saja. Berdasarkan pengalaman, lanjut Iqbal, dua agama sebelumnya, yakni Yahudi dan Kristen, telah gagal menuntun umat manusia menjalani kehidupan. Kegagalan Yahudi adalah karena mereka terlalu mementingkan aspek legalitas formal peraturan-peraturan. Adapun kegagalan agama Kristen karena terlalu mengutamakan aspek spiritual dan ritual saja. Kristen tak berhasil

memberikan nilai-nilai kepada pemeliharaan negara, undang-undang, dan organisasi kenegaraan. Di atas kegagalan kedua agama ini, Al-Qur'an berdiri di tengah-tengah dan sama-sama mementingkan kehidupan dunia dan agama, pribadi dan masyarakat serta ritual dan moral. Keduanya berjalan seimbang.

Pandangan ini merupakan basis bagi Muhammad Iqbal dalam mengembangkan teori-teori pemikiran politik Islamnya. Bagi Iqbal, antara politik pemerintahan dan agama tidak terdapat pemisahan. Memang, pandangan Muhammad Iqbal ini bukanlah sesuatu yang baru dalam politik Islam. Pemikir-pemikir politik Islam Abad Klasik dan Pertengahan juga menyatakan perlunya penyatuan antara agama dan negara. Abu al-Hasan al-Mawardi, umpamanya, menyatakan bahwa khilafah (pemerintahan) dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian. Fungsinya adalah demi memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Demikian juga al-Ghazali yang menyatakan bahwa agama dan khilafah merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan. Agama memberi fondasi, sedangkan khilafah merupakan penjaganya.

Akan tetapi, dalam perjalanan sejarah, pemikiran demikian terkubur bersama arus kehidupan politik umat Islam yang semakin memburuk, terutama pasca-serangan tentara Mongol 1258. Akhirnya, umat agama Islam tidak mampu lagi menangkap visi dinamis agama Islam. Akhirnya, walaupun tidak ditegaskan, lahirlah pandangan yang menyatakan pemisahan antara agama dan kehidupan duniawi, dan orang yang paling bertanggung jawab atas keadaan ini, sebagaimana dikecam Iqbal, adalah para mullah atau ulama tarekat yang hanya mementingkan masalah-masalah akhirat. Akhirnya, dalam permasalahan hukum, umat agama Islam gagal menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan utama dan hukum pun menjadi statis tidak mampu mengantisipasi setiap perkembangan permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan keadaan lingkungan sosial politik umat Islam di atas, Iqbal ingin menggerakkan mereka agar bersikap dinamis dan kreatif dalam menghadapi hidup dan menciptakan perubahan-perubahan di bawah tuntunan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Begitu pentingnya dinamisme ini dalam kehidupan, sehingga Iqbal, seperti dikutip W.C. Smith, menyatakan bahwa kafir yang dinamis lebih baik daripada Muslim yang statis. Islam, dengan sumber utamanya Al-Qur'an, sebenarnya telah memberikan nilai-nilai dinamisme itu bagi umat Islam. Nilai-nilai ajaran tersebut harus mampu digali dan dikembangkan secara serius oleh umat Islam untuk dijadikan pedoman dalam mengarahkan perubahan itu. Kuncinya adalah mengadakan pendekatan rasional terhadap Al-Qur'an dan mendalami semangat yang dikandungnya, bukan menjadikannya sebagai buku peraturan perundang-undangan yang bersifat kaku dan statis.

KESIMPULAN

Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Iqbal adalah dua tokoh pemikir Islam yang berusaha menjawab tantangan modernisasi dan kolonialisme melalui pendekatan yang berbeda. Ridha berfokus pada reformasi institusional dan politik dengan menekankan pentingnya persatuan umat Islam dan penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan. Di sisi lain, Iqbal menekankan pentingnya rekonstruksi intelektual dan spiritual, serta penerimaan institusi modern yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Keduanya berkontribusi signifikan dalam pemikiran politik Islam dengan tujuan akhir untuk menghidupkan kembali kejayaan dan kekuatan umat Islam di dunia modern. Beberapa Pemikiran Politik mereka yaitu :

Pemikiran Politik Muhammad Iqbal

1. Rekonstruksi Pemikiran Islam

Iqbal mengadvokasi rekonstruksi pemikiran Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ia mengkritik stagnasi intelektual dalam dunia Islam dan mendorong

reinterpretasi ajaran Islam yang dinamis dan kreatif. Iqbal percaya bahwa pemikiran Islam harus selalu berkembang dan tidak boleh terjebak dalam dogma yang kaku.

2. Konsep Negara Islam

Iqbal mendukung gagasan negara Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan egalitarianisme sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Namun, ia juga menerima elemen-elemen demokrasi dan institusi modern yang dapat mendukung nilai-nilai Islam. Iqbal berpendapat bahwa negara Islam harus memberikan kebebasan kepada individu untuk mengembangkan potensi mereka dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3. Kemandirian dan Kebangkitan Spiritual

Bagi Iqbal, kebangkitan spiritual adalah inti dari kemajuan politik dan sosial. Ia menekankan pentingnya kebangkitan spiritual individu dan masyarakat Muslim. Iqbal percaya bahwa kekuatan spiritual ini adalah dasar dari segala bentuk kemajuan dan bahwa tanpa kebangkitan spiritual, upaya politik dan sosial tidak akan berhasil.

4. Pentingnya Ijtihad

Iqbal mendorong praktek ijtihad, yaitu upaya intelektual untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks zaman modern. Ia percaya bahwa ijtihad adalah alat penting untuk menjaga relevansi dan dinamika Islam dalam menghadapi tantangan baru. Iqbal menolak taqlid (mengikuti secara buta) dan mendorong pemikiran kritis dan kreatif dalam interpretasi ajaran Islam.

Pemikiran Politik Muhammad Rasyid Ridha

1. Reformasi Islam

Rasyid Ridha adalah seorang reformis yang sangat dipengaruhi oleh gurunya, Muhammad Abduh. Ia percaya bahwa Islam perlu diperbarui agar relevan dengan tantangan zaman modern. Ridha menekankan pentingnya kembali ke ajaran asli Quran dan Sunnah yang murni, sambil mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi Barat. Reformasi ini diperlukan untuk mengatasi kemunduran yang dialami oleh dunia Islam dan untuk membangun kembali kekuatan dan kejayaan umat Islam.

2. Pan Islamisme

Salah satu aspek utama pemikiran Ridha adalah pan-Islamisme, yaitu gagasan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk membentuk satu kesatuan politik yang kuat. Ridha melihat persatuan ini sebagai cara untuk melawan kolonialisme Barat dan memastikan keberlangsungan serta kekuatan politik Islam. Ia menganggap khilafah (kepemimpinan Islam global) sebagai institusi penting untuk mencapai tujuan ini.

3. Penolakan Sekularisme

Ridha menolak konsep sekularisme yang memisahkan antara agama dan negara. Menurutnya, Islam adalah sistem kehidupan yang mencakup semua aspek, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, tidak boleh ada pemisahan antara agama dan pemerintahan. Ridha percaya bahwa nilai-nilai Islam harus mendasari sistem pemerintahan dan hukum di negara-negara Muslim.

4. Pentingnya Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Ridha menekankan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mencapai reformasi dan kemajuan. Ia mendorong umat Islam untuk belajar dari Barat dalam hal sains dan teknologi, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk membangun masyarakat yang kuat dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Azzam, *Puisi dan Filsafat Iqbal*, terjemahan Ahmad Rofi' Usman, (Bandung: Pustaka, 1981),
- Ahmad Amin, *Islan dari Masa ke Masa* (Bandung: Remaja Rosda Karya), 1991,
- Al-Mawardi, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.),
- An Fauzia Rozani Syafei, 2018, "Sejarah Pemikiran Modern", CV Berkah Prima,
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan tinggi Agama/LAIN, 1992/1993), Jilid III,
- Disertasi Iqbal ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Joebaar Ayoeb, dengan judul *Metafisika Persia Suatu Sumbangan untuk Sejarah Filsafat Islam*, (Bandung: Mizan, 1990).
- Diya' al-Din Rayia, *Al-Nazhariyat al-Siyasah al-Islamiyah*, (Mesir Maktabah al-Anju al-Misriyah), 1960,
- Fadjar Tri Sakti, 2020, "Pengantar Ilmu Politik", Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
- Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, (London: Macmillan Press, 1982), h. 70.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya II*, (Jakarta: UI Press, 1986),
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I,
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1975),
- Iqbal, *The Reconstruction*,
- J. Suyuti Pulungan, *Figih Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994),
- Miss Luce Claude-Maitre, *Pengantar ke Pemikiran Iqbal*, (Bandung: Mizan, 1989),
- Muhammad Abduh, *Risalah al-Tawhid*, ed., Abdul Razek, (Paris, Mustafa, 1925),
- Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981),
- Muhammad Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salâm*, Juz 11, (Bandung: Maktabah Dahlan t.tt.),
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993),
- Para ahli berbeda pendapat dalam mencatat tahun kelahiran Iqbal. Luce Claude-Maitre mencatat tanggal 22 Februari 1873. (Lihat bukunya *Pengantar ke Pemikiran Iqbal*, terjemahan Djohan Effendi, [Bandung: Mizan, 1983], h. 13). Sementara Wilfred C. Smith menyebut tahun 1876. (Smith, *Modern Islam in India*, [Lahore: Usha Publication, 1976], h. 116). Adapun J. Marek, sebagaimana dikutip Annemarie Schimmel mencatat tanggal 9 November 1877. Pendapat ketiga inilah yang paling kuat dan diakui secara resmi oleh Pemerintah Pakistan
- Parveen Feroze Hassan, *The Political Philosophy of Iqbal*, (Lahore: United Ltd., 1978),
- Rasyid Ridha, *Al-Khilafah aw al-Imamah al-Uzhma*, (Mesir: al-Maktabah al-Manar, 1314 H),
- Rasyid Ridha, *Al-Wahy al-Midyammadiy*, edisi Indonesia, *Wahyu Ilahi kepada Muhammad*, terj Josef CD, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983),
- Rasyid Ridha, *Majalah al-Manâr*, Jilid III, 1900,
- Rasyid Ridha, *Tarikh al-Ustadz al-Imam al-Sayyid Muhammad Abduh*, (Al-Manar, 1931 M/1350 H),
- Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1989),
- Veda Kartika Prabaswara, Moh. Harits Amanda Rifqi, Iqbal Akhsanun N, 2023, "Berpikir Dalam Perspektif Psikologi dan Islam", Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang,
Wilfred Cantwell Smith, Modern Islam in India,
Wilfred Cantwell Smith, Modern Islam in India, (Princeton: Princeton University Press,
1957),